

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal penanganan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual belum sesuai. Implementasi dari Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya sesuai dikarenakan beberapa faktor seperti, kurangnya pemahaman lembaga perlindungan korban, aparat penegak hukum mengenai perspektif korban, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan stigma sosial yang masih melekat pada korban yang mengakibatkan korban enggan melapor.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa langkah penting bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan korban pemerintah ataupun non-pemerintahan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus agar lebih memahami perspektif korban dan menangani kasus dengan lebih baik.

Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas serta sumber daya UPTD PPA di berbagai daerah, sekaligus menyediakan fasilitas yang memadai, seperti rumah aman dan layanan kesehatan. Edukasi masyarakat juga berperan penting dalam mengurangi stigma serta mendorong korban untuk berani melapor. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah perlu diperkuat guna memastikan korban memperoleh layanan yang komprehensif dan berkualitas.



Daftar Pustaka

Buku

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran paradigma pembedaan*, Lubuk Agung, Bandung
- G. Widiartana, 2014, *VIKTIMOLOGI: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F LAMINTANG, 1984, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*, Penerbit Sinar Baru, Bandung
- Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Sulistyowati, 2020, *ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN*, Cetakan Pertama, Penerbit Budi Utama, Sleman

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 120. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 293. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

- Alhan Ramadhan Saputra dkk, 2022, "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil", Jurnal IKAMAKUM, Vol. 2, No. 2, Tangerang Selatan, Universitas Pamulang
- Gabriella Amanda Tombokan dkk, 2024, "Tinjauan Peran Lembaga Perlindungan Perempuan Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual", Jurnal Hukum, VOL.6 NO. 4: Juni, review-unes
- Jihan Kamilla Azhar dkk, "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban", *Social Work Journal*, Vol 13-no. 1-2023), jurnal.unpad.ac.id
- Laela Rahmah Putri dkk, 2024, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review", *Jurnal Psikologi*, VOL.1 NO. 4: AUGUST, pubmedia
- Raja Aisha Kencanadewi dkk, 2024, "Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Tanjungpinang)", *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 8, no. 1;Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Saptaning Ruju Paminto dkk, 2023, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol 5-NO-1/Juli/2023, Universitas Suryakencana

Tesis/Disertasi

- DEBBY, 2018, *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi*, Tesis S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Silviana Febri Rustandi, 2024, *OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN FASILITAS PERHITUNGAN RESTITUSI KEPADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA TIMUR*, Tesis S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Internet

- Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya | Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak->

[pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/](#), diakses 13 Oktober 2024

Cakrawikara, 2022, Mengenal Perspektif Korban Dalam UU TPKS, <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/11/Mengenal-Perspektif-Korban.pdf>, diakses 13 Oktober 2024

JDIH Kabupaten Sukoharjo, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses 13 Oktober 2024

M. Faiz Zaki dkk, 2024, KPAI Minta Polisi Yang Cabuli Anak Panti Asuhan Di Kantor Polsek Tanjung Pandan Belitung Ditindak Tegas - Metro Tempo.Co, <https://metro.tempo.co/amp/1893733/kpai-minta-polisi-yang-cabuli-anak-panti-asuhan-di-kantor-polsek-tanjung-pandan-belitung-ditindak-tegas>, diakses 13 Oktober 2024

Singgih Wiryono dkk, 2024, Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>, diakses 13 Oktober 2024

Tim Hukum online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, hlm. 2, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses 8 November 2024.